

JURNAL ILMIAH
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENGELOLAAN LIMBAH
OLEH PENGELOLA USAHA LAUNDRY DALAM
PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KOTA
YOGYAKARTA



Disusun oleh :

BOY SALOMO LEONARD SAMOSIR

NPM	: 05 05 09195
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

ABSTRACT

Laundry business is growing rapidly in the city of Yogyakarta . Business detergents are strongly associated with this course will not be separated from the issue of the environment if the waste can not be managed properly . Good waste management is an effort to preserve the environment . How implementation and what are the constraints faced by entrepreneurs in the implementation of obligations laundry waste management in the control of environmental pollution in the city of Yogyakarta . This thesis aims to determine how the implementation of waste management obligations by laundry manager in the control of environmental pollution in the city of Yogyakarta .

The research conducted in this thesis is an empirical study that focuses on the behavior of law . This research requires primary data as the main ingredient in addition to the secondary data . The method used is descriptive qualitative analysis method . conclusions drawn in this study , namely the implementation of the obligations by the laundry manager in terms of managing the waste and dispose of the waste has not done well . Factor is the shortage of funds and lack of awareness of protecting the environment of the laundry manager .

Associated with waste management laundry , it is expected that the government can provide education and control over the laundry manager who does not carry out its obligations . Government and laundry business managers would be able to cooperate in the handling and disposal of waste .

A. Latar belakang

Dewasa ini banyak berkembang kegiatan bisnis yang terkait dengan jasa pencucian pakaian atau yang lebih dikenal dengan jasa laundry. Usaha laundry adalah usaha yang bergerak dibidang jasa cuci dan setrika. Usaha ini banyak terdapat di berbagai Kota besar di Indonesia, terutama di kota yang banyak terdapat jumlah mahasiswanya. Kehadiran usaha jasa laundry memberikan kemudahan bagi mahasiswa, salah satunya dapat meringankan beban pekerjaan rumah mahasiswa tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga dan mengganggu aktifitas sehari-hari mahasiswa sehingga waktu dan tenaga lebih efisien, selain itu juga memberikan manfaat ekonomi bagi pengelola laundry.

Selain dampak positif, usaha laundry juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Harus diakui bahwa bahan kimia yang digunakan pada detergen dapat menimbulkan dampak negatif, baik terhadap kesehatan maupun lingkungan. Terkait dengan usaha laundry yang juga menghasilkan limbah cair, yang apabila tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan problem lingkungan dimasa yang akan datang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Kewajiban Pengelolaan Limbah Oleh Pengelola Usaha Laundry dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Yogyakarta.

2. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Kewajiban Pengelolaan Limbah Oleh Pengelola Usaha Laundry Dalam Pengendalian pencemaran Lingkungan Di Kota Yogyakarta.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Kewajiban Pengelolaan Limbah yang dilakukan Oleh Pengelola Usaha *Laundry* Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui apakah ada kendala yang dihadapi dalam melakukan Pelaksanaan Kewajiban Pengelolaan Limbah Usaha *Laundry* Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan peraturan hukum yang terkait dalam masalah lingkungan khususnya pengelolaan limbah sebagai pengendalian pencemaran lingkungan.
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka mengendalikan pencemaran lingkungan sebagai akibat keberadaan usaha *laundry* di Kota Yogyakarta.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan metode analisis dan kualitatif.

F. Pembahasan

A. Tinjauan tentang Laundry

1. Sejarah Laundry di Indonesia

Sejak saat kemerdekaan, kegiatan pembangunan di Indonesia semakin marak maka kesibukan penduduk menjadi semakin tinggi. Mereka yang terlibat dalam pembangunan prasarana tersebut menjadi manusia sibuk yang sering tidak bisa meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan seperti *laundry* sehingga mereka memerlukan jasa *laundry*. Dalam perkembangannya banyak orang yang memisahkan pakaiannya, sebagian menggunakan *laundry* kiloan, sebagian lagi menggunakan *laundry* satuan.

2. Pengertian dan Jenis-jenis Laundry

Laundry adalah kata benda yang mengacu pada tindakan mencuci pakaian, tempat mana yang mencuci dilakukan, dan atau yang perlu, sedang, atau telah dicuci. *Laundry* dapat juga diartikan sebagai kegiatan mencuci pakaian atau bahan tekstil lainnya dan juga sebagai sebuah tempat untuk mencuci pakaian atau bahan tekstil lainnya.

Jasa *Laundry* dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu :

1. Berdasarkan Sistem Perhitungan: *Laundry* satuan, *Laundry* kiloan, *Laundry* Berlangganan
2. Berdasarkan Sistem Pencucian: *Laundry* biasa, *Laundry Dry cleaning*

3. Berdasarkan Waktu Pengerjaan: *Laundry* kilat, *Laundry One Day Service*, *Laundry Ordinary* adalah jenis *laundry* yang melayani dengan lama waktu pengerjaan 3 (tiga) atau 4 (empat) hari.
4. Berdasarkan Waktu Pembayaran *laundry* dapat dibagi menjadi :
Laundry Harian, *Laundry* Mingguan, *Laundry* Bulanan.

3. Perizinan Usaha Laundry

Perizinan merupakan instrumen hukum lingkungan yang mempunyai fungsi preventif, yaitu mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Melalui izin, pemerintah dapat menetapkan syarat-syarat lingkungan tertentu yang harus dipenuhi oleh pemilik kegiatan.

Dalam wawancara dengan Yogyakarta Bapak Nursulistyohadi ,Sm.Hk., selaku Kasi Data Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, mengenai usaha jasa *laundry* tersebut minimal mempunyai HO atau izin gangguan.

4. Dampak kegiatan usaha laundry

- a. Beberapa dampak positif yang diberikan *laundry*, meliputi :
 - 1) Bagi pelaku usaha, usaha *laundry* memberikan keuntungan dan menjadi salah satu pilihan berwirausaha.
 - 2) Bagi konsumen, memberikan keringanan dan menghemat waktu maupun tenaga dalam pengerjaan cuci dan setrika pakaian.
 - 3) Lapangan pekerjaan, usaha ini dapat menampung pelamar kerja dengan jumlah yang sangat banyak.

- 4) Bagi pemerintah Daerah, merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah.

Adapun dampak negatif yang ditimbulkan oleh usaha *laundry* adalah sebagai berikut :

- 1) Bagi Lingkungan, pencemaran tanah, pencemaran air, aroma yang tidak sedap, kerusakan ekosistem lingkungan.
- 2) Bagi kesehatan, menyebabkan diare dikarenakan virus, penyakit kulit seperti kudis dan kurap akibat iritasi.

B . Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Akibat Limbah Laundry

1. Pengertian Limbah

Pada dasarnya limbah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia, maupun proses-proses alam dan tidak atau belum mempunyai nilai ekonomi.

2. Pengertian Pencemaran

Pengertian pencemaran lingkungan menurut Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan hidup adalah “ Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”

3. Pengendalian Pencemaran

Menurut Pasal 13 ayat (1) UUPH, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran meliputi :

- a. Pencegahan
- b. Penanggulangan
- c. Pemulihan

C. Pelaksanaan Kewajiban Pengelolaan Limbah oleh Pengusaha Laundry dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kota Yogyakarta

1. Kondisi Perkembangan Usaha Laundry di Kota Yogyakarta

Bisnis usaha *laundry* kiloan belakangan ini di berbagai kota di Indonesia, khususnya di Kota Yogyakarta. Hal ini dikarenakan banyaknya jumlah mahasiswa yang datang dari seluruh wilayah di Indonesia. Bisnis *laundry* diawali dengan konsep *laundry* rumahan yang menampung cucian dari mahasiswa. Dikarenakan penghitungan biaya *laundry* perpotong cukup mahal, sehingga muncul gagasan dengan menggunakan sistem perhitungan kiloan. Satu (1) kg pakaian bisa untuk 4-5 potong pakaian, tentunya sangat menguntungkan bagi konsumen.

Berdasarkan data Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, total *laundry* yang memiliki izin berjumlah 83 usaha yang tersebar di 14 kecamatan, selebihnya adalah usaha *laundry* yang tidak memiliki izin sama sekali. Keberadaan usaha *laundry* terus meningkat, namun hingga kini belum ada pengawasan yang baik terkait dengan pengolahan limbah *laundry*.

2. Dampak kegiatan usaha laundry di Kota Yogyakarta

Adapun dampak yang dihasilkan usaha *laundry* ini, baik dampak positif maupun negatif adalah sebagai berikut :

a. Dampak positif:

- 1) Bagi pelaku usaha, memberikan keuntungan bagi pelaku usaha tersebut.
- 2) Bagi Konsumen, memberikan kemudahan waktu dan tenaga dalam mengerjakan pekerjaan mencuci dan menyetrika.
- 3) Bagi tenaga, memberikan lapangan pekerjaan bagi para pencari kerja.
- 4) Bagi Pemerintah, usaha *laundry* juga dapat menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

b. Dampak Negatif:

Adapun dampak negatif yang ditimbulkan oleh limbah *laundry* adalah sebagai berikut :

- 1) Bagi lingkungan, usaha *laundry* yang menggunakan detergen yang mengandung fosfat tinggi berpotensi mencemari air tanah dan air sumur.
- 2) Bagi kesehatan, Pembuangan Limbah usaha *laundry* di Kota Yogyakarta yang pada umumnya sembarangan dibuang begitu saja ke selokan kota ataupun aliran sungai, mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap warga di sekitarnya, seperti diare, kudis, kurap dan penyakit kulit lainnya.

3. Kewajiban Pengelola Kegiatan Usaha Laundry di Kota Yogyakarta

Usaha laundry memiliki kewajiban yang telah ditetapkan. Adapun kewajibannya adalah sebagai berikut :

a. Berdasarkan Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

- 1) “ Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:
 - b. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
 - c. mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (Pasal 20 ayat 1)
- 2) “Setiap Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) wajib membuat suratpernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup”. (Pasal 35 ayat 1).
- 3) “ Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”. (Pasal 53 ayat 1)
- 4) “Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.”(Pasal 54 ayat 1)
- 5) “ Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.”(Pasal 59 ayat 1)
- 6) “ Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”(Pasal 67)
- 7) “ Setiap orang yang melakukan usaha/atau kegiatan berkewajiban :
 - a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengeloan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
 - b. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, dan;
 - c. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan /atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

b. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

- 1) “ Setiap usaha dan atau kegiatan yang akan memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib mendapat izin tertulis dari Bupati/Walikota. (Pasal 35 ayat 1)
- 2) “Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menang-gulangi terjadinya pencemaran air. (Pasal 37)

- c. Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, Pelayanan Kesehatan, Dan Jasa Pariwisata.:
- 1) Setiap penanggung jawab dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah cair, sehingga mutu limbah cair yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan.
 - 2) Setiap penanggung jawab dan/atau kegiatan wajib membuat saluran pembuangan limbah cair tertutup dan kedap air, sehingga tidak terjadiperembesan ke tanah dan terpisah dengan saluran air hujan, serta menyediakan bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh limbah cair.
- d. Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Walikota Yogyakarta No 41 Tahun 2006 : Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPL) dipersyaratkan bagi usaha-usaha yang sudah berjalan/atau sedang berjalan, tetapi belum dilengkapi dengan dokumen AMDAL, maupun UKL/UPL.

Di samping kewajiban sesuai dengan peraturan tersebut di atas, berdasarkan hasil wawancara dengan BLH dan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, setiap usaha *laundry* harus memiliki Izin gangguan dan juga Surat Pernyataan Perlindungan Lingkungan (SPPL) khusus usaha *laundry* yang memiliki lebih dari 3 unit mesin.

Dari 5 (lima) usaha *laundry* yang diteliti oleh penulis di wilayah Kota Yogyakarta hanya 3 unit usaha memiliki izin, yaitu *Laudry Zone*, *Laundry Kencana* dan *Laundry Smile*, selainnya adalah *laundry* yang tidak berizin, yaitu *Laundry Happy* dan *Laundry Joely*.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pengelola *laundry*, yakni *laundry “Zone”* yang berada di daerah Wirogunan, usaha yang telah berdiri sejak tahun 2009 ini telah memiliki *outlet* di beberapa wilayah di Kota Yogyakarta selalu memperhatikan dampak lingkungan. *Laundry* yang juga

melayani hotel, rumah sakit dan beberapa perusahaan ini telah memiliki IPAL guna menghindari pencemaran tanah dan air tanah disekitarnya. Usaha *laundry* ini mengakui bahwa ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk pembuatan Instalasi pembuangan air limbah.

Hal yang dilakukan *laundry* Kencana tidak berbeda jauh dengan yang dilakukan oleh pengelola *laundry* Zone. Usaha *laundry* yang berada di daerah Baciro ini , melakukan pengolahan dan pembuangan limbah dengan menggunakan IPAL yang cukup sederhana, namun tetap memperhatikan dampak lingkungan sekitarnya. Pengelola *laundry* ini juga melakukan penaburan tawas ke setiap bak penyaringan, hal ini diyakini dapat mengurangi konsentrasi limbah yang berbahaya sehingga lebih cepat mengalami penetralan.

Hal yang berbeda yang penulis temukan ketika mewawancarai *laundry* yang tidak berizin, yaitu *Laundry* Joelly dan *Happy Laundry*. Pemilik usaha *laundry* Joelly menyatakan bahwa ia sejak tahun 2009 membuang limbahnya secara sporadik ke dalam selokan umum. Di tempat yang berbeda, pengelola *laundry* Happy mengatakan bahwa usaha *laundry*nya tidak akan mampu mengelola dan menghadirkan alat-alat pengelolaan limbah secara mandiri. Limbah yang dihasilkan usaha *laundry* ini langsung dialirkan melalui saluran limbah rumah tangga tanpa melalui proses pengolahan limbah.

4. Pengawasan Kegiatan Usaha Laundry

Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan terhadap kegiatan usaha laundry oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta meliputi:

- a. Pengawasan terhadap perizinan usaha *laundry*
- b. Pengawasan terhadap penggunaan detergen usaha *laundry*
- c. Pengawasan terhadap proses pembuangan limbah *laundry*

5. Kendala dalam Pelaksanaan Kewajiban Pengelolaan Limbah oleh Pengusaha Laundry dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Yogyakarta

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa yang menjadi kendala dalam pengelolaan limbah adalah sebagai berikut:

- a. adanya keterbatasan dana dalam pembuatan pengolahan limbah.
- b. Kurangnya kesadaran dari pengelola *laundry*.
- c. Pengelola usaha *laundry* tidak memahami unsur-unsur kimia yang terkandung di dalam limbah detergen yang dihasilkan begitu juga dengan dampak lingkungan yang akan ditimbulkan oleh limbah usaha *laundrynya*
- d. Pemerintah Kota masih belum memberikan perhatian khusus terhadap dampak pertumbuhan usaha *laundry*.

G. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kewajiban pengelolaan limbah oleh beberapa usaha laundry yang diteliti di Kota Yogyakarta sebagai langkah pengendalian pencemaran lingkungan, belum terlaksana dengan baik.
2. Kendala yang dihadapi pengelola usaha laundry adalah adanya keterbatasan dana oleh masing-masing pengelola laundry untuk mengadakan Instalasi Pembuangan Air limbah secara pribadi. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan mengenai bahaya limbah beracun yang dihasilkan usaha laundrynya serta belum adanya perhatian khusus dari pemerintah terhadap dampak pertumbuhan usaha laundry di Kota Yogyakarta.

H. Saran

1. Pemerintah perlu melakukan penyuluhan dan penertiban terhadap pengelola usaha laundry yang membuang limbahnya langsung ke selokan air tanpa proses pengolahan
2. Pengelola usaha laundry agar mengutamakan pemakaian detergen yang ramah dengan lingkungan.
3. Para pengelola laundry hendaknya dapat mendirikan wadah paguyuban, agar nantinya dapat bekerja sama dengan pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan penanganan terhadap pengelolaan limbah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

A . Tresna Sastrawidjaya A, 2009, *Pencemaran Lingkungan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Adrian Suted, 2010, *Hukum Perizinan dan Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Fuad Amsyari, 1977, *Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Hamrat Hamid dan bambang Pramudyanto, 2007, *Pengawasan Industri Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan*, Granit, Jakarta.

Husin Sukanda, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Koesnadi Hardjasoemantri, 2002, *Hukum Tata Lingkungan*, UGM Press, Edisi 7 Cetakan ke-XVII, Yogyakarta

Kristanto, 2002, *Pencemaran Limbah Cair*, Yudistira, Jakarta.

Peter Salim dan Yeny Salim, 1991, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern Engglish, Jakarta.

Soetandyo Wignjosoebroto, 2008, *Hukum Dalam Masyarakat*. Bayumedia, Surabaya.

Soeparman H.M, 2002, *Pembuangan Tinja dan Limbah Cair*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta.

Wisnu Arya Wardana, 2001, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air.

Peraturan Kebijakan :

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri, Pelayanan Kesehatan, Dan Jasa Pariwisata.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tentang Izin Gangguan.

Website :

“Definisi Laundry” at <http://library.binus.ac.id/eColls/eThesis/Bab2/2008-2-00169-DS%20bab%202.pdf>, diakses 8 Desember 2013.

“Limbah Laundry Bersiko Cemari Air Tanah”,At
<http://jogja.tribunnews.com/2013/02/13/limbah-laundry-berisiko-cemari-air-tanah/>, diakses 3 Desember 2013.

<http://nationalgeographic.co.id/berita/2012/04/jasa-laundry-picu-pencemaran-limbah-b3>. diakses 8 Agustus 2013.

<http://jogya.antarnews.com/berita/308555/blh-yogyakarta-siap-terima-pengaduan-limbah-laundry>. Diakses 2 Desember 2013.

<http://superlaundry.blogspot.com/2010/04/jenis-jenis-laundry.html>,

8 Desember 2013

Laundry, at <http://Wikipedia.com>, diakses 10 Oktober 2013.